

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR BULU KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

Oleh:

Fitri Anggi Br Peranginangin, Slamet Santoso, Dyah Lituhayu, Dyah Hariani

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan pasar tradisional semakin menurun seiring pesatnya perkembangan pasar modern. Kehadiran pasar-pasar modern yang dikelola secara profesional diklaim telah mendiskreditkan keberadaan pasar tradisional. Pengembangan revitalisasi pasar yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan upaya mempertahankan eksistensi pasar tradisional itu sendiri, hal ini upaya untuk meningkatkan daya saing pasar terhadap pasar modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan pengembangan pasar Bulu berdasarkan pada Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan merumuskan alternatif kebijakan pengembangan pasar Bulu berdasarkan Perda No.9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori brigman dan Davis yang menyebutkan ada lima tahapan analisis kebijakan yaitu diantaranya (1) Merumuskan formulasi kebijakan; (2) Menentukan Tujuan Kebijakan (3) Mengidentifikasi Parameter Kebijakan;(4) mencari alternatif-alternatif kebijakan; (5) Memutuskan alternatif kebijakan. Parameter pada analisis kebijakan ini menggunakan parameter dfari Patton dan Sawicky yang menyebutkan ada empat kriteria dalam menilai alternatif kebijakan yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik dan kelayakan administrasi.

Hasil penelitian menyebutkan Masalah yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Bulu adalah (1) ketersediaan dan pemeliharaan fisik; (2) tingkat perekonomian pasar Bulu yang membahas tentang tingkat penerimaan retribusi pasar Bulu dan tingkat daya saing pasar Bulu; (3) Keterbatasan manajemen perpasaran yang membahas tentang penataan zonasi pasar Bulu, ketersediaan kemandirian pasar Bulu, dan kepatuhan pedagang; (4) tingkat pemberdayaan pedagang dan peran serta masyarakat yang membahas tentang tingkat pemberdayaan pedagang pasar dan keterlibatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pasar Bulu.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Pengembangan revitalisasi pasar Bulu, Perda No.9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam mewujudkan kemakmuran serta mensejahterakan rakyat memberikan perhatian pada pembangunan ekonomi. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah karena diharapkan dengan menguatnya perekonomian daerah maka akan menguatkan perekonomian nasional.

Pasar tradisional mempunyai peran strategis pula dalam penyerapan tenaga kerja, Survey yang dilakukan BPS Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor ritel mampu menyerap 24,8 juta tenaga kerja atau sekitar 21,6 % dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 38,9 juta tenaga kerja atau sekitar 33,9% dari tenaga kerja Indonesia. (Iis Nurlaela, "Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang".2017)

Pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen. Pada akhirnya pasar tradisional memberikan

manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik produsen, pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parkir. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapat manfaat dari pemasukan retribusi yang akan disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas.

Di balik peranan pasar tradisional tersebut tidak terlewat berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian Pemerintah. Keberadaan pasar tradisional kini semakin menurun seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern. Kehadiran pasar-pasar modern yang dikelola dengan baik dan profesional oleh para investor diklaim telah mendiskreditkan keberadaan pasar tradisional. Sebagian besar pasar tradisional masih terkesan becek, bau, sumpek, pengap, dan kotor. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai hasil penelitian khususnya di kota-kota besar di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern telah berdampak pada penurunan omset pedagang di Pasar Tradisional secara signifikan. (Fransisca Yaningwati, dkk, 2009).

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu kota terbesar yang memiliki potensi sangat tinggi dalam hal perdagangan. Letaknya yang strategis, yaitu berada di perlintasan Pantura, kondisi geografis Kota Semarang yang berada di pesisir Laut Jawa dan memiliki pelabuhan Tanjung Mas, yang relatif besar guna menunjang aktifitas perdagangan antar pulau di Indonesia.

Revitalisasi pasar Bulu dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangunan pasar sehingga pasar Bulu yang nantinya mampu menampung para pedagang kaki lima atau (PKL) yang ada di sekitar pasar, termasuk

juga PKL yang berada di Jl. Pandaran. Diharapkan dengan revitalisasi Pasar Bulu ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Pasar Bulu di revitalisasi guna menjadi pasar percontohan di Kota Semarang dengan menjadikan Pasar Bulu sebagai Pasar Semi Modern, hal ini dilakukan bertujuan guna meningkatkan daya saing Pasar Bulu sendiri terhadap pasar modern yang ada di kota Semarang. beberapa aspek masalahnya diantaranya :

Pertama, dilihat dari aspek fisik yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional khususnya dalam Bab IV yaitu pengelolaan pasar belum terselenggara dengan baik seperti kondisi pasar yang berbau tidak sedap, kotor, kumuh, area bongkar muat yang belum tersedia, pompa air di basement (tempat parkir) Pasar Bulu yang tidak berfungsi yang jika saat hujan deras mengakibatkan area parkir banjir, dan atap lantai tiga yang bocor, kamar mandi umum yang terlihat kotor, serta beberapa fasilitas yang belum berfungsi dengan baik.

Kedua, dari aspek ekonomi, penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan, pedagang belum merasakan keramaian pembeli, terlebih-lebih pembeli yang berada pada ujung jalan pintu utama yang berdampak pada penurunan omset penjualan, berkurangnya jumlah pedagang pasar, serta kurangnya produk yang diperdagangkan di pasar. Dalam aspek ekonomi sangatlah terlihat kekurangannya apalagi setelah dilakukan revitalisasi, setelah revitalisasi dilakukan pasar Bulu nyatanya lebih sepi pengunjung dan banyak pedagang yang mulai berkurang berjualan dibandingkan sebelum dilakukannya revitalisasi.

Ketiga, aspek manajemen yaitu masih banyak pedagang yang berjualan di area parkir, zonasi pedagang yang kurang

tepat, kepatuhan pedagang yang kurang, serta pelayanan pasar yang kurang optimal. *Keempat*, aspek sosial budaya yaitu belum terwujudnya kondisi pasar yang nyaman, serta masih rendahnya keikutsertaan pedagang dalam paguyuban pedagang pasar Bulu sebagai wadah kegiatan sosial dan inspirasi para pedagang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka penulis merasa tertarik meneliti berbagai permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dalam pengembangan Pasar Bulu. Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan dengan teori paper kebijakan, untuk mendapatkan alternatif-alternatif kebijakan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi keseluruhan proses kebijakan, untuk itu penulis memilih judul “**Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang Berdasarkan Pada PERDA Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional**”.

B. TUJUAN

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan pengembangan Pasar Bulu Berdasarkan Pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
2. Merumuskan alternatif kebijakan pengembangan Pasar Bulu Berdasarkan Pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

C. TEORI

Tahapan analisis kebijakan menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono, (2002 :65) dalam analisis kebijakan setidak-tidaknya meliputi lima langkah dasar yaitu sebagai berikut :

a. Memformulasikan Masalah Kebijakan

Hal ini merupakan langkah pertama dalam sebuah analisis kebijakan, memformulasikan masalah merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan

krusial. Hal ini dikarenakan apabila dalam memformulasikan masalahnya salah maka akan dengan sendirinya kebijakan publik yang diterapkannya salah pula.

b. Menentukan Tujuan dan Sasaran

Tahapan ini akan sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Merumuskan tujuan dan sasaran bukanlah hal yang mudah oleh karena berbagai kompleksitas masalah dan kepentingan. Namun, karena semua kebijakan publik ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan

umum maka dalam tataran umum semua tujuan dan sasaran harus diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan sesuai dengan bidang-bidang kebijakannya.

c. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Parameter-parameter kebijakan ini perlu didalami lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan seperti :

1. Apakah nasehat kebijakan yang disampaikan sesuai dan relevan dengan kondisi saat ini ?
2. Apakah nasehat kebijakan kebijakan yang disampaikan menyediakan pandangan ke depan (*forward looking*) yang lengkap dan memungkinkan ?
3. Apakah nasehat kebijakan yang ditawarkan bisa mengantisipasi berbagai hal yang mungkin timbul dikemudian hari ?

4. Apakah nasehat kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi-implikasi (politis, ekonomis, lingkungan, dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif ?

5. Apakah nasehat kebijakan menyediakan strategi yang jelas dan realistis terhadap sebuah proposal kebijakan ?

6. Apakah nasehat kebijakan tersebut mudah dilaksanakan ?

d. Mencari alternatif-alternatif

Tahapan selanjutnya dalam analisis kebijakan adalah pencarian alternatif-alternatif kebijakan. Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan. Beberapa masukan yang bisa dijadikan dasar atau metode mencari alternatif adalah (1)mempelajari kebijakan yang sedang berlangsung saat ini baik yang terjadi di daerah lain, Indonesia atau mungkin negara lain; (2) mempelajari penemuan internasional mengenai permasalahan yang relevan dengan sebuah proposal kebijakan; (3) mempelajari berbagai informasi, *review*, laporan atau seminar yang berkaitan dengan isu kebijakan tersebut; (4) mempelajari jurnal-jurnal akademik terbaru yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kebijakan tersebut; (5) melakukan curah fikir, diskusi dengan para ahli baik yang berada dalam struktur pemerintahan maupun non pemerintahan seperti perguruan tinggi ataupun pusat studi dan pusat kajian lainnya yang berkompeten; (6) melakukan konsultasi publik dengan

masyarakat yang akan terkena publik dengan masyarakat yang akan terkena kebijakan dalam rangka mendalami masalah dan mengidentifikasi respon atau alternatif yang mungkin dilakukan.

e. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan

Hal ini merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Ini artinya bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambilan keputusan bisa menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan.

Dalam analisis kebijakan terdapat kriteria atau parameter kebijakan. Menurut Bardach yang dikutip Patton dan Sawicky dalam Keban, (1995 :55) ada empat kategori yang dapat dijadikan parameter atau kriteria dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu:

1. *Technical Fasibility* (kelayakan teknis) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah keluaran (*outcome*) dari kebijakan atau program akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dengan konteks teknis.
2. *Economic and Financial Possibility* (kemungkinan ekonomi dan finansial) yaitu kriteria yang digunakan mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan dan beberapa kemungkinan yang dihasilkan.

Kriteria ini menyangkut evaluasi ekonomis dari kebijakan atau program yang ada.

3. *Political Viability* (kehidupan politik) yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan akan berhasil dimana terdapat pengaruh dari berbagai kelompok kekuasaan, seperti pembuat keputusan, legislatif, administrator, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan dan aliansi politik lainnya.
4. *Administrative Operability* (administrasi). Kriteria spesifik dalam *administrative operability* adalah *authority, institutional commitment, capability dan organizational support*.

D. METODOLOGI

1. Desain Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini merupakan metode yang mengeksplorasi serta memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif serta menafsirkan makna data (Creswell, 2014:4).

2. Situs Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, maka Penelitian ini

akan dilaksanakan di Kota Semarang, khususnya di: Dinas Perdagangan Kota Semarang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wilayah Bulu dan Pasar Bulu Kota Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: hasil wawancara, hasil dokumentasi dan gabungan

5. Teknik Analisa Data

Proses analisis data sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Formulasi Masalah Kebijakan

a. Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar Bulu

Pengelolaan pasar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan. Adapun masalah yang tercakup dalam pengelolaan pasar Bulu adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas Pasar Bulu

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional menyebutkan dalam Bab IV pengelolaan pasal 9 tentang pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk menyediakan bangunan pasar yang terdiri atas bangunan utama dan fasilitas perpasaran lainnya dengan

memperhatikan aspirasi pedagang setempat, sehingga pembangunan fisik gedung menurut Perda kota Semarang harusnya melibatkan aspirasi pedagang. kelengkapan fasilitas didapat bahwa beberapa fasilitas belumlah terlengkapi di pasar Bulu seperti bongkar muat, pusat pelayanan kesehatan, tempat penitipan anak, dan kantor sekretariat organisasi pedagang. Fasilitas yang belum terlengkapi yang lebih banyak mendapat keluhan adalah bongkar muat, dimana tempat bongkar muat yang menjadi bagian penting dalam perpasaran hanya bisa dilakukan di tempat parkir lantai 1 dan belum terdapat di setiap lantai, seperti yang kita ketahui bahwa pasar Bulu memiliki 3 lantai. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa bongkar muat yang dilakukan di area parkir mengakibatkan terganggunya aktifitas perparkiran, selain itu pedagang lantai 2 dan 3 mendapat kesulitan dalam mengangkut barang dagangan mereka. Kesulitan dalam bongkar muat ini membuat pedagang membawa barang dagangannya melalui sepeda motor keatas lantai, dimana membawa sepeda motor sebenarnya dilarang

- Penataan Zonasi Pasar

Pengaturan zonasi pasar sudah diatur dalam peraturan pemerintah sendiri, namun dengan adanya zonasi pasar yang ada di pasar Bulu ternyata banyak keluhan dari para pedagang. Ukuran lapak yang dikira pedagang sempit menjadi penyebab salah satunya bahwa pengaturan zonasi ini belum efektif dilakukan. Pengaturan zonasi pasar dilakukan seharusnya dipikirkan jangka panjangnya yaitu dengan berkembangnya pasar Bulu nantinya maka diperlukan juga lapak yang luas

untuk memperbesar usaha dagang atau barang-barang pedagang di Pasar Bulu, namun dengan lapak yang sempit tidak memungkinkan pengembangan usaha pedagang.

- **Ketersediaan Keamanan Pasar**
Keamanan pasar Bulu sebagaimana yang didapat dilapangan bahwa keamanan sebagaimana yang diatur dalam Perda diatas bahwa belumbisa dirasakan pedagang dengan baik. Kemanan yang dimaksud disini adalah bebas dari tindak kejahatan seperti pencurian atau pencopetan sehingga memberi rasa nyaman dalam berdagang. Keamanan pasar belum terlaksana dengan baik karena pedagang merasa tugas dan tanggungjawab dari petugas keamanan belum berjalan dengan baik.
- **Pemberdayaan Pedagang Pasar**
Pemberdayaan pedagang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan meningkatkan peran serta pedagang dalam pengelolaan pasar serta meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat. Dalam pemberdayaannya ini Pemerintah selaku organisasi public mengembangkan kebijakan dengan memberikan pembinaan kepada oranisasi pedagang.

b. Kepatuhan Pedagang

Kepatuhan pedagang meliputi hak, kewajiban, larangan serta sanksi administrasi yang beracuan pada isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. kepatuhan pedagang sebagai suatu yang harus dipenuhi adalah memliki ijin berdagang dalam pasar Bulu sendiri. Kepemilikan ijin ini yang seharusnya menjadi pembahasan dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

pengaturan pasar tradisional di Pasar Bulu didapat bahwa belum semua pedagang memiliki surat ijin. Pedagang yang belum memiliki surat ijin ini adalah pedagang yang baru datang ke Pasar Bulu. Pendataan tentang kepemilikan surat ijin juga memiliki kendala karena banyak kios yang ditinggalkan oleh pedagang membuat kesulitan kepada petugas untuk mendata ulang perijinan yang dimiliki.

c. Penyelenggaraan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu

Penerimaan retribusi mengalami penurunan dan belum sesuai dengan target yang ditargetkan oleh Dinas Perdagangan. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2011 adalah tahun yang mendapat penerimaan retribusi paling banyak. Namun, pada tahun 2012 pasar Bulu mulai dilakukan revitalisasi. sehingga penerimaan retribusi pasar menurun dari tahun sebelumnya. Pedagang menempati pasar sementara kurang lebih dua tahun sampai tahun 2014. Hal ini berdampak pula pada penerimaan retribusi pasar. Penerimaan retribusi hanya dari tiket masuk pedagang saja. Pada akhir tahun, tepatnya 24 Desember 2014 pedagang mulai direlokasi ke bangunan pasar Bulu yang baru. Setelah kurang lebih tiga tahun pedagang menempati pasar Bulu penerimaan retribusi masih mengalami penurunan bahkan berbeda jauh sebelum pasar direvitalisasi. Selain mengalami penurunan, penerimaan retribusi juga tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dinas Perdagangan setiap tahun telah menurunkan target retribusi dengan pertimbangan penerimaan retribusi tahun sebelumnya dan kondisi pasar. Akan tetapi, target penerimaan retribusi belum dapat dicapai.

d. Penyelenggaraan Daya Saing Pasar Bulu

Pasar mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini karena pasar menjadi tempat yang mampu menggerakkan perekonomian demi

pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan jual beli. Seiring dengan perkembangan perekonomian di bawah rezim perdagangan bebas di era global seperti saat ini, pola perdagangan telah berkembang sedemikian rupa yang kemudian melahirkan berbagai bentuk bentuk pasar modern, mulai dari mini market, super market, dan bahkan hyper market, yang kesemuanya itu berpotensi mematikan usaha perdagangan masyarakat golongan ekonomi lemah dari pengusaha kecil dan menengah di pasar-pasar tradisional.

2. Penentuan Tujuan Kebijakan

a. Peningkatan Pengelolaan Pasar

Fasilitas perpasaran adalah tempat, sarana, atau alat yang disediakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan pasar guna mendukung kegiatan perpasaran. Fasilitas adalah hal yang sangat dipentingkan guna menunjang kegiatan pedagang dalam berdagang begiu juga dengan pembeli pasar. Fasilitas yang terawat akan menandakan bahwa pasar tersebut bersih dan terawat dan akan jauh dari kesan kumuh. Pasar tradisional banyak ditinggalkan dan beralih ke pasar modern seperti supermarket atau mall salah satunya karena fasilitas pasar yang kurang memadai dan kurang terawatt yang menyebabkan banyak orang tidak betah lama-lama di pasar apalagi untuk berbelanja. Namun, ketika pasar terawat, teratur serta bersih maka pengunjung akan mulai berdatangan karena pasar tradisional semakin nyaman.

Pemberdayaan pedagang merupakan aspek sosial untuk meningkatkan dinamika positif pada pedagang, dalam pemberdayaannya terdapat wadah pedagang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pasar Bulu yaitu paguyuban pedagang. Organisasi pedagang ini sudah

diatur dalam kebijakan pemerintah sendiri baik yaitu Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Adanya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perdagangan pada pedagang pasar tradisional.

b. Peningkatan Kepatuhan Pedagang

Peningkatan kepatuhan pedagang adalah upaya membentuk keteraturan serta ketertiban dalam pasar. kepatuhan pedagang dalam hal ini meliputi hak, kewajiban, perijinan, pengendalian, dan sanksi administrasi. Kepatuhan pada pedagang diharapkan guna untuk mencapai keteraturan dan ketertiban pada pasar sehingga pengembangan pasar Bulu dapat ditingkatkan.

c. Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu

Tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan pasar tradisional dalam revitalisasi pasar Bulu dari segi aspek ekonomi adalah mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar Bulu yang mana semakin meningkatnya retribusi pasar akan berpengaruh terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Tujuan ini terdapat dalam Perda Kota Semarang no.9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yaitu menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

d. Peningkatan Daya Saing Pasar Bulu

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional menyebutkan tujuan pengaturan pasar tradisional adalah untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing. Pasar tradisional telah banyak mengalami pengurangan dan kehilangan daya saing akibat adanya pasar modern, terlebih lagi manajemen pasar yang kurang dibanding pasar modern yang lebih

professional menyebabkan pasar tradisional diupayakan dapat memiliki daya saing.

3. Identifikasi Parameter Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu

a. Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis yang dapat dinilai dari dua sub-kriteria yaitu efektifitas dan kecukupan (Subarsono, 2009 : 59). Kelayakan teknis pada pengembangan pasar Bulu dapat dilihat dari pencapaian yang diinginkan dari kebijakan pengaturan pasar tradisional. Pencapaian yang diinginkan adalah dengan adanya penyediaan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pedagang pasar Bulu seperti fasilitas bongkar muat yang dibutuhkan untuk tempat mengangkut barang dagangan pedagang. Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan fasilitas basement yang sering banjir akibat pompa air yang sudah ada tidak berfungsi dengan baik. Pengembangan pasar Bulu akan berhasil jika pedagang mengikuti aturan pemerintah serta pengaturan zonasi pasar yang perlu untuk ditata kembali.

Kelayakan teknis berhubungan dengan apakah kebijakan telah dapat mengatasi pokok permasalahan yang terjadi di pengembangan pasar tradisional Bulu. Dinas Perdagangan menyatakan bahwa kebijakan pengaturan pasar tradisional seharusnya sudah mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasar Bulu serta pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap pengaturan pasar tradisional yang sudah dilakukan masih 20 persen.

b. Kelayakan Ekonomi dan Finansial

Kelayakan ekonomis dan finansial dilihat dari sub-kriteria *economic efficiency*, *profitabilitas*, dan *cost effectiveness* (Subarsono 2009:59) Pasar Bulu sebagai salah pasar tradisional di Semarang yang

telag direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah pasar Bulu direvitalisasi mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan ini disampaikan langsung oleh Ketua PPJP Pasar Bulu bahwa sebelum pasar Bulu direvitalisasi pengunjung masih ramai berdatangan, dan salah satu penyebabnya adalah rute menuju pasar Bulu yang sudah banyak perubahan sehingga orang-orang mulai malas datang ke pasar Bulu. Pernyataan juga diberikan oleh salah satu pedagang dimana revitalisasi ini belum berhasil dari segi ekonomi karena bangunan yang baru dibuat mengalami kekurangan seperti jalan pengunjung yang sempit sehingga pengunjung merasa kurang nyaman.

c. Kelayakan Politik

Kelayakan politik mempunyai penilaian yang mencakup tingkat penerimaan, kepatutan, daya tanggap, dan keadilan (Subarsono 2009:59). Kelayakan politik berhubungan dengan apakah kebijakan pengaturan pasar tradisional dapat diterima oleh para actor public dan masyarakat. Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Bulu, serta kepala pasar yang menjalankan kebijakan ini mengatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di pasar Bulu. Selaku pihak masyarakat menerima kebijakan ini karena sudah seharusnya pengaturan pasar tradisional dapat meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

d. Kelayakan Administratif

Kelayakan Administratif berhubungan dengan komitmen para administrator dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk melaksanakan kebijakan secara benar. Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Bulu, dan Kepala Pasar

menjelaskan bahwa mereka mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Walaupun menurut kelompok sasaran dalam kebijakan ini, pelaksanaan terhadap kebijakan ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

4. Perumusan Alternatif-Alternatif Kebijakan

a. Meningkatkan Pengelolaan Pasar Bulu

Pembangunan pasar membutuhkan sebuah investasi besar, sehingga keberadaan pasar diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh unit pasar. Pengelolaan pasar yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri dengan peningkatan sarana dan prasarana pasar, daya saing pasar yang baik, memberikan tingkat kepuasan layanan yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

Dampak yang ditimbulkan dari segi teknis adalah pengaturan kawasan dan zonasi pasar serta kepatuhan pedagang diperbaiki akan mencapai efektivitas dan kecukupan bagi pedagang. Dari segi ekonomi akan meningkatkan retribusi pasar jika pedagang menaati peraturan pemerintah yaitu dengan tidak meninggalkan kios miliknya. Dari segi politik pihak Dinas dapat memberi intervensi tegas kepada pedagang yang melanggar aturan yang telah dibuat. Dari segi administrasi, pemerintah dapat mengkoordinasikan lagi dengan pihak terkait tentang zonasi pasar serta ketertiban pedagang yang dikoordinasikan dengan satpol PP.

b. Meningkatkan Kepatuhan Pedagang

Dampak yang ditimbulkan dari teknis adalah banyaknya pedagang yang meninggalkan kios/los yang diberikan pemerintah, kios/los yang ditutup ini

dikarenakan sepi pembeli yang datang ke pasar Bulu. Tujuan dari adanya revitalisasi pasar tradisional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, namun pasar Bulu mengalami hal sebaliknya dimana pasar Bulu mengalami kekurangan pembeli. Dari segi ekonomi, dengan banyaknya pedagang yang tidak menaati peraturan pemerintah tentunya dari hal retribusi pasar akan mengalami penurunan. Dari segi politik pihak Dinas dapat memberi intervensi tegas kepada pedagang yang melanggar aturan yang telah dibuat. Dari segi administrasi, pemerintah dapat mengkoordinasikan lagi dengan pihak terkait tentang pelanggaran pedagang di pasar Bulu serta ketertiban pedagang yang dikoordinasikan dengan satpol PP.

c. Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu

Dari segi ekonomi sebelum adanya revitalisasi bahwa pendapatan pedagang lebih banyak dibanding dengan sesudah revitalisasi. Namun, dengan adanya upaya peningkatan retribusi dan peningkatan daya saing pasar Bulu akan meningkatkan segi ekonomi.

Alternatif disini adalah menarik pedagang potensial di Semarang untuk memotivasi pedagang Pasar Bulu untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya sehingga pengunjung dipasar Bulu semakin ramai serta retribusi pasar meningkat ketikam pengunjung semakin ramai.

d. Meningkatkan Daya Saing Pasar Bulu

Aspek ini untuk mengembangkan pasar tradisional untuk memiliki daya saing dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga pasar tradisional tidak akan kalah dengan pasar lainnya. Pasar

modern yang memiliki manajemen yang lebih profesional akan dapat mengalahkan pasar tradisional dengan mudah, namun dengan adanya revitalisasi pasar tradisional diharapkan pasar tradisional dapat mampu bersaing dan mendapat tempat di hati masyarakat.

e. Memutuskan Alternatif

Alternatif pilihan adalah Meningkatkan pengelolaan pasar. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa parameter yang layak digunakan adalah parameter kelayakan teknis karena dapat mewakili parameter lain. Setelah alternative terpilih diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap akhir adalah memutuskan alternative pilihan, pada tahap ini diperlukan penerimaan terhadap pemilihan alternative. Untuk penelitian ini model pembuatan kebijakan yang dipilih adalah model elit dimana model ini dipilih melihat dari penemuan-penemuan yang ada dilapangan. Realisasi kebijakan dengan yang terjadi dilapangan menjadikan penulis memilih model elit. Alternatif pilihan yang dipilih adalah meningkatkan pengelolaan pasar Bulu. Meningkatkan pengelolaan pasar Bulu yang dimaksud memiliki cakupan yaitu penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pada pasar Bulu, pentaan zonasi pada pasar Bullu, penyediaan kemanan pasar Bulu, serta meningkatkan peran pedagang dalam pasar Bulu.

Model elit ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Elit menciptakan system yang mana kebijakan

publik tidak banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit namun perubahan dapat terjadi jika ada peristiwa yang mengancam system politik. sehingga massa sebagian besar menjadi pasif, apatis, dan buta informasi tentang kebijakan publik. Elit mempengaruhi massa dan bukan sebaliknya, komunikasi berjalan satu arah yaitu dari atas ke bawah. Massa sulit menguasai elit. Dan massa tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Merumuskan Masalah

Penelitian ini terdapat tahapan analisis kebijakan yang digunakan adalah dari teori Brigman dan Davis yang menyebutkan lima tahapan yaitu (1) memformulasikan masalah kebijakan; (2) Menentukan Tujuan; (3) mengidentifikasi parameter kebijakan; (4) mencari alternative-alternatif; dan (5) memutuskan alternative. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua. Adapun analisis yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- Masalah kebijakan

- 1) Formulasi masalah kebijakan

Rumusan masalah yang diambil dari kebijakan pengembangan pasar Bulu ini adalah: penyelenggaraan pengelolaan pasar Bulu, kepatuhan pedagang, penyelenggaraan penerimaan retribusi pasar Bulu, penyelenggaraan daya saing pasar Bulu.

Keempat masalah ini dipilih oleh peneliti karena memiliki masalah yang spesifik yang harus diselesaikan untuk mengembangkan pasar Bulu. Fasilitas

pasar Bulu sesuai dengan kebijakan Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2013 ada beberapa fasilitas yang belum tersedia di dalam Pasar Bulu sendiri serta fasilitas yang sudah tersedia namun kurangnya pemeliharaan dari petugas sehingga mengalami kerusakan, masalah kedua adalah perekonomian pada pasar Bulu, perekonomian disini dimaksud adalah tingkat retribusi pada pasar Bulu serta daya saing yang dimiliki pasar Bulu, masalah ketiga adalah manajemen perpasaran yang dimulai dari tahapan awal pasar, perencanaan, pengelolaan pasar serta kepatuhan pedagang, masalah terakhir yang dirumuskan adalah pemberdayaan pedagang.

2) Menentukan tujuan kebijakan

Tujuan ini ditarik dari formulasi kebijakan untuk menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Adapun penentuan tujuan kebijakan adalah : peningkatan pengelolaan pasar Bulu, Peningkatan kepatuhan pedagang, Peningkatan penerimaan retribusi pasar Bulu, Peningkatan daya saing pasar Bulu.

Tujuan ini ditarik dari formulasi kebijakan untuk menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah.

3) Mengidentifikasi parameter kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan proposal kebijakan. Parameter yang digunakan disini adalah berdasarkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan politik dan kelayakan administrasi.

b. Perumusan Alternatif

1) Mencari alternative-alternatif

Dari kelima permasalahan yang sudah diuraikan penulis memberikan berbagai

alternatif kebijakan dalam pengembangan pasar Bulu, diantaranya :

- Meningkatkan pengelolaan pasar Bulu
Pengelolaan perpasaran mencakup perencanaan pasar, pengadaan pasar, penetapan pasar, pemanfaatan pasar, pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar, dan penyelenggaraan pelayanan pasar. Pengelolaan pasar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
- Meningkatkan Kepatuhan Pedagang Pasar Bulu
Kepatuhan pedagang sesuai dengan Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional. Kepatuhan ini meliputi hak, kewajiban dan larangan untuk pedagang pasar Bulu
- Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bulu
Tujuan dari pasar tradisional adalah untuk meningkatkan perekonomian untuk masyarakat juga untuk daerah yaitu dari segi retribusinya. Pasar Bulu direvitalisasi guna menjadi pasar semi modern. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan masyarakat, sekaligus untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Dalam pengelolaan ini yang diutamakan adalah daya saing yang harus dimiliki oleh pedagang pasar tradisional sehingga tidak tergeser oleh pasar modern.
- Meningkatkan Daya Saing Pasar Bulu
Untuk mengembangkan pasar tradisional dibutuhkan daya saing guna meningkatkan kemampuan pedagang

dalam mengembangkan pasar dan bisa mengikuti perkembangan jaman serta bisa bersaing dengan pasar modern yang memiliki manajemen yang professional. Adanya revitalisasi pasar tradisional diharapkan daya saing dapat meningkat dan kesejahteraan peangang meningkat.

2) Memutuskan alternatif pilihan

Dengan melihat kondisi pada saat ini, yaitu menurunnya jumlah pasar tradisional dibanding dengan dengan pasar modern maka pemerintah membuat peraturan yaitu dengan adanya revitalisasi pasar tradisional. Namun, pengembangan revitalisasi ini belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan, melihat banyaknya permasalahan yang masih ada setelah revitalisasi pasar tradisional. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya untuk mengajukan peningkatan manajemen perpasaran. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa parameter yang layak digunakan adalah parameter kelayakan teknis karena dapat mewakili parameter lain.

Maka petugas pengelola pasar dan pedagang juga menginginkan adanya peningkatan dalam manajemen perasaran guna mengembangkan pasar Bulu. Cara melaksanakan alternative ini dengan cara mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.

2. Saran

a. Rumusan Masalah

Masalah yang ditemukan dalam pengembangan pasar Bulu memerlukan minimalisir dan pemecahan masalah guna meningkatkan pasar Bulu menjadi pasar yang mempunyai pengelolaan pasar yang baik, kepatuhan pedagang yang perlu ditingkatkan dan

memerlukan solusi dari pemerintah guna menertibkan pedagang serta mencari penyebab ketidak patuhan ini, diperlukannya peningkatan penerimaan retribusi pasar sehingga pasar akan tetap berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta diperlukannya peningkatan daya saing pasar agar tidak kalah dengan pasar modern yang ada di kota Semarang.

b. Perumusan Alternatif

Diperlukan kerjasama dan komitmen semua pihak untuk merealisasikan alternative kebijakan pilihan terbaik dalam analisis kebijakan pengembangan pasar Bulu yaitu dengan meningkatkan pengelolaan pasar Bulu dengan baik. Pengelolaan pasar yang baik akan meningkatkan pengembangan pasar Bulu sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi*

- Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja, AR. 1992. *Studi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Nugroho, Riant. 2011. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model – Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media
- Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta
- , 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suwitri, Sri, 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- , 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka.
- Wibawa, Samodra DKK. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pessindo
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumber lain :**
- Adri Poesoro, “Pasar Tradisional di Era Persaingan Global”, Newsletter Lembaga Penelitian Smeru No. 22: Apr-Jun/2007, hlm. 3.
- Fransisca Yaningwati, dkk, 2009, *Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Universitas Brawijaya, Malang.
- Irnawati, Husein. 2014. *Peranan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada diunduh pada 21 Maret 2017
- Masitoh, Eis Al. 2013. *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. Jurnal. PMI Vol.X. No. 2. Diunduh pada 21 Maret 2017
- Nurlaela, Iis. 2017. *Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang*. Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Diponegoro diunduh pada 20 Mei 2017.
- Peraturan – Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman dan

Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
61/M-DAG/PER/8/2015 tentang
Pedoman Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Standar Nasional Indonesia 8152 Tahun
2015 tentang Pasar Rakyat

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9
Tahun 2013 Tentang Pengaturan
Pasar Tradisional